laku; Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Sistem MRT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus 'Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 23005

(BN)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN
ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
(PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 27 Tahun 2017, tanggal 31 Maret 2017)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan lintas pelayanan kereta api kelas ekonomi, pola operasi serta pola pelayanan yang berdampak pada perubahan tarif angkutan dengan kereta api kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayan publik, perlu mengatur kembali penyusunan Peraturan Menteri mengenai tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayan publik (*Public Service Obligation*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayan Publik (*Public Service Obligation*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 197 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 49);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1848), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan

Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*), terdiri atas :
 - a. perkeretaapian antar kota; dan
 - b. perkeretaapian perkotaan.
 - (2) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Menambahkan lintas dan tarif orang dengan kereta api kelas ekonomi perkotaan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 3. Ketentuan pada Lampiran II diubah, yaitu mencabut Kereta api Lokal Rangkas/Ekonomi lokal lintas Angke – Rangkasbitung dan Kereta api Rangkas Jaya lintas Rangkasbitung – Tanahabang/Angke yang berubah menjadi KR dan

mencabut Kereta api Merak Jaya /Patas Merak/ Banten Ekspres/Lokal Merak, Kereta api Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta, Kereta api Jatiluhur dan Kereta api Walahar Ekspres/ Ekonomi Lokal yang berubah lintas pelayanan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 5 April 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 541

LAMPIRAN I

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN

No	NAMA ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)	Ket.
1	2	3	4	5
KA JARAK DEKAT/LOKAL				
1	Merak Jaya/Patas Merak/ Banten Ekspres/Lokal Merak	Merak - Rangkasbitung	3.000	Perubahan pada Asal Tujuan serta besaran tarif
2	Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta	Purwakarta - Tanjung priok	6.000	Perubahan pada Asal Tujuan
3	Jatiluhur	Cikampek - Tanjung priok	5.00	Perubahan pada Asal Tujuan
4	Walahar Ekspres/Ekon Lokal	Tanjungpriok - Purwakarta	6.000	Perubahan pada Asal Tujuan
5	Bandung Raya Ekonomi	Cicalengka - Purwakarta	7.000	Lintas Pelayanan Baru
6	Bandung Raya Ekonomi	Cibatu - Padalarang	7.000	Lintas Pelayanan Baru

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN

NO	JENIS ANGKUTAN/NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
KA JARAK DEKAT/LOKAL			
1	Ekonomi Lokal/Cibatuan	Purwakarta - Cibatu	8.000
2	Bandung Raya Ekonomi	Kiaracondong - Cicalengka	4.000
3	Bandung Raya Ekonomi	Bandung - Padalarang	4.000
4	Bandung Raya Ekonomi	Bandung - Cicalengka	4.000
5	Bandung Raya Ekonomi	Cicalengka - Padalarang	5.000
6	Penataran	Surabaya kota - Malang Blitar	15.000
7	Dhoho	Surabaya kota - Kertosono Blitar	15.000
8	Penataran	Blitar - Malang Surabaya kota	15.000
9	Tumapel	Malang - Surabaya kota	10.000
10	Ekonomi Lokal	Kertosono - Surabaya kota	10.000
11	Ekonomi Lokal	Sidoarjo - Surabaya Ps.Turi Bojonegoro	12.000
12	Ekonomi Lokal	Sidoarjo - Surabaya Ps.Turi	6.000
13	Ekonomi Lokal	Surabaya - Ps.Turi Bojonegoro	6.000
14	Pandan wangi	Jember - Banyuwangi	8.000
15	Kalijaga	Purwosari - Semarang poncol	10.000
16	Sibinuang	Pariaman - Padang	5.000
K R D			
17	KRD	Sidotopo/Surabaya-Porong	5.000
18	KRD	Surabaya-Lamongan	5.000
19	Prameks	Yogyakarta/Lempuyangan - Solo balapan/Solojebres	8.000
20	Prameks	Lempuyangan/ Yogyakarta - Kutoarjo/Prembun	8.000
21	Prameks	Prembun/Kutoarjo - Solobalapan/Solojebres	15.000
22	Seminung	Kotabumi - TanjungKarang	10.000
23	Way Umpu	Tanjung Karang - Kotabumi	10.000
24	Kedung Sepur	Ngrombo - Semarang Poncol	10.000
25	Sri Lelawangsa	Medan - Binjai	5.000

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

BUDI KARYA SUMADI

(BN)